

Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Menanggulangi Bencana Banjir

Fatihmah¹, Dida Rahmadanik², Indah Murti³

¹²³ Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

fatimahiim309@gmail.com,
didarahma@untag-sby.ac.id,
indah@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* oleh Purwanto & Sulistyastuti, 2012, dengan fokus pada tujuh indikator diantaranya, indikator akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan pelayanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Hasil penelitian ini membahas tujuh aspek tersebut dalam konteks analisa kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah.

Kata Kunci: Kinerja; BPBD; Bencana Banjir

ABSTRACT

This study focuses on the performance analysis of the Regional Disaster Management Agency of Sidoarjo Regency. The purpose of this study is to analyze the performance of the Regional Disaster Management Agency in mitigating floods. This study uses a descriptive qualitative method with primary and secondary data collection. Primary data were obtained from observation, interviews, and documentation. While secondary data were taken from journals, books, and other relevant references. This study uses the Public Sector Performance Measurement theory by Purwanto & Sulistyastuti, 2012, with a focus on seven indicators including access, coverage, frequency, bias, service accuracy, accountability and program suitability to needs. The results of this study discuss these seven aspects in the context of analyzing the performance of the Regional Disaster Management Agency.

Keywords: Performance; BPBD; Flood Disaster

1. PENDAHULUAN

Permasalahan rutin ketika musim hujan datang yaitu timbulnya genangan atau banjir di beberapa titik atau tempat khususnya daerah perkotaan. Banjir atau genangan sendiri bisa terjadi dikarenakan sistem yang berfungsi untuk menampung genangan itu tidak mampu menampung debit yang mengalir sehingga air yang tertampung meluber dan terjadinya banjir. Kasus-kasus banjir yang kerap terjadi di daerah perkotaan perlu ditelaah lebih lanjut lagi. Karena sampai saat ini permasalahan banjir di Sidoarjo masih belum menemukan titik terang yang pasti untuk menanggulanginya. Bisa dipastikan setiap tahunnya wilayah perkotaan akan mengalami genangan yang cukup parah apalagi jika perkotaan tersebut mempunyai penduduk yang padat. Permasalahan yang kerap timbul pada daerah perkotaan Sidoarjo yaitu adalah genangan yang

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



belum sepenuhnya bisa teratasi. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk memunculkan alternatif penanggulangan permasalahan banjir atau genangan tersebut serta mengukur kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memberikan pelayanan dan penanggulangan bencana banjir pada masyarakat yang terdampak.

Upaya dan Program yang sudah dilakukan oleh BPBD sebelumnya memang bisa dibilang cukup membantu, namun yang menjadi permasalahan sekaligus latar belakang penelitian ini adalah bagaimana program tersebut bisa dirasakan secara merata khususnya untuk masyarakat Kecamatan Waru. Selain daripada itu, BPBD adalah badan atau lembaga yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam menanggulangi bencana alam, salah satunya banjir. Baik sebelum terjadi sampai pada terjadi dan pasca banjir. Meski sebelumnya BPBD Jatim secara kolaboratif telah melakukan aksi mitigasi melalui bersih-bersih sampah dan eceng gondok di Kali Buntung dan Kali Sinir, namun tetap saja curahan air hujan di kawasan tersebut tak mampu tertampung. Akibatnya, sejumlah desa di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo kembali terendam banjir, dengan kedalaman antara 10-50 cm. Di antaranya, di Desa Waru, Medaeng, Kureksari, Tropodo, Tambaksawah dan Tambaksumur.

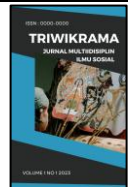
Selain itu, di beberapa wilayah Kecamatan Waru terdapat tindakan peninggian jalan. Peningkatan jalan di area-area desa dalam Kecamatan Waru kemungkinan besar adalah salah satu metode untuk menangani banjir yang dilaksanakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) atau lembaga terkait. Walaupun tidak secara langsung disebutkan, strategi semacam ini umumnya merupakan elemen dari rencana penanggulangan banjir yang berjangka panjang bertujuan untuk dengan tujuan mengurangi enangan, memperlancar akses dan mencegah dampak lebih luas. Namun, cara tersebut justru menimbulkan masalah baru bagi para warga yang memiliki pemukiman dengan tanah atau lahan lebih rendah dipinggir jalan. Imbasnya adalah air akan turun ke pemukiman saat hujan, selain itu juga dapat menimbulkan keresahan warga dalam penggunaan jalan karena tidak seimbang antara jalan raya dengan lahan pemukiman warga.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber yang terkena dampak langsung, upaya yang dilakukan oleh BPBD pada tahun 2024 dengan membantu evakuasi warga yang terdampak banjir dan memberikan beberapa bantuan, dinilai masyarakat kurang efektif karena beberapa kali terjadi banjir terjadi di sekitar kecamatan Waru, namun team dari BPBD jarang melakukan tindakan secara langsung baik pra bencana atau pasca bencana banjir. Hal yang mendasari dan menjadi alasan peneliti memilih judul tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Banjir, sekaligus membuktikan penilaian dari masyarakat perihal kinerja BPBD dalam upaya menanggulangi banjir di Kota Sidoarjo. Jika strategi nya sesuai dan berhasil diterapkan seharusnya masalah banjir di beberapa kecamatan di kota Sidoarjo sudah tidak terjadi, karena seperti yang kita ketahui masalah banjir ini cukup merugikan masyarakat yang terdampak. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengumpulan datanya ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada kesempatan kali ini peneliti memfokuskan pembahasan pada variabel analisis atau pengukuran kinerja sehingga peneliti mengangkat judul ***“Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Menanggulangi Bencana Banjir”***.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kinerja

Konsep kinerja menurut Osborne dalam Quade (1990:1) berpendapat bahwa kinerja sebagai tingkat pencapaian misi organisasi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan oraganisasi. Semakin banyak misi yang dilakukan, maka semakin bagus kinerja dari organisasi yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, kinerja organisasi dikatakan buruk apabila



hanya sedikit misi yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Osborne dan Gaebler, dalam konsep "reinventing government", berpendapat bahwa organisasi publik juga perlu berorientasi pada hasil dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, layaknya organisasi bisnis. Mereka menyoroti pentingnya pemerintah yang katalis (mengarahkan), milik masyarakat (memberdayakan), kompetitif, berorientasi hasil, dan berorientasi pelanggan Menurut Rue dan Byars (1980:376), Kinerja diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau "The degree of accomplishment" atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa melalui kinerja, tingkat pencapaian organisasi dapat diketahui. Pencapaian atas tujuan tujuan organisasi tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai baik atau buruknya kinerja organisasi.

Tingkat Kinerja

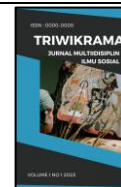
Menurut Robbins (1998: 21) memberikan arti kinerja adalah tingkat pencapaian tujuan. Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan maka pengertian analisis kinerja merupakan proses pengumpulan informasi tentang bagaimana tingkat kemampuan pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi sehingga tujuan akan tercapai. Tingkat kinerja pegawai akan sangat tergantung pada faktor kemampuan pegawai itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman dimana dengan kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja semakin tinggi pula. Dengan demikian tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang rendah akan berdampak negatif pada kinerja pegawai. (Manurung et al., 2013)

Pengukuran Kinerja

"Indikator kinerja output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan" (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). (Adolph, 2016b) Menurut Purwanto & Sulistyastuti, indikator kinerja output antara lain:

1. Indikator akses, mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya.
2. Indikator cakupan (*coverage*), digunakan untuk mengetahui seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan yang diimplementasikan.
3. Indikator frekuensi, merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program.
4. Indikator bias, merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer mengalami penyimpangan.
5. Indikator ketepatan pelayanan (*service delivery*), digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.
6. Indikator akuntabilitas, digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan output kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.
7. Indikator kesesuaian program dengan kebutuhan, digunakan untuk mengukur apakah berbagai output kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Dari ketiga elemen tersebut, peneliti memfokuskan pembahasan pada variabel pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja mengacu pada Pengukuran kinerja di sektor publik berkaitan dengan



penilaian tentang bagaimana pemerintah atau lembaga publik lainnya telah memenuhi sasaran yang telah ditentukan, yang meliputi pengukuran mengenai efisiensi, efektivitas, dan pengaruh dari kebijakan, program, atau layanan yang disediakan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah, menjamin akuntabilitas, serta memberikan landasan untuk pengalokasian sumber daya yang lebih baik dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lebih focus lagi, dalam dimensi pengukuran kinerja terdapat tujuh indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, indikator akses, cakupan, frekuensi, bias, ketepatan pelayanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan fenomena atau gejala yang terjadi secara alami (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif berlandaskan naturalis dan bersumber pada pengamatan lingkungan. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang diamati oleh peneliti dan disertai dengan penyajian bukti-bukti yang mendukung. Pemahaman terhadap fenomena tersebut sangat dipengaruhi oleh keahlian dan ketelitian peneliti dalam melakukan analisis. Peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk mereduksi dan memurnikan sehingga diperoleh makna fenomena yang sesungguhnya (Nasution, 2023).

Jenis dan Sumber Data

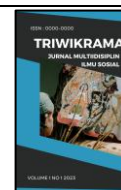
Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait ataupun melalui pengamatan langsung dari peneliti dilapangan atau tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisa.

Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam (*depth interview*), observasi partisipasi (*participant observation*), dan diskusi terfokus (*focus group discussion*). Adapun beberapa instrumen yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan Secara umum, pengupulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam (*depth interview*), observasi partisipasi (*participant observation*), dan diskusi terfokus (*focus group discussion*). Kemudian peneliti melakukan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui proses tanya jawab secara tatap muka. Kemudian peneliti menggunakan dokumentasi agar data lebih relevan dengan focus penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi atau wawancara akan memiliki kredibilitas yang lebih tinggi jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisi Data

Adapun prosedur penelitian *gorounded theory* yang diadaptasi dari Strauss & Corbin menggunakan teknik analisis data yang meliputi, *open coding*, *axial coding*, *selective coding* (Nasution, 2023). Pada tahap *open coding*, peneliti mengidentifikasi dan membuat berbagai kategori berdasarkan informasi terkait fenomena yang diteliti. Setelah kategori-kategori tersebut



dibentuk, peneliti menyusun kategori tersebut ke dalam bentuk lain (misalnya, mode visual) dengan menggunakan paradigma pengkodean untuk menemukan data-data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahapan ini dikenal sebagai *axial coding*. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu *selective coding*, peneliti merangkai cerita berdasarkan hubungan antar kategori yang telah dibuat dan mengembangkan hipotesis untuk menjelaskan keterkaitan antar kategori tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

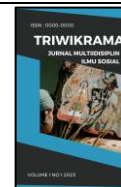
HASIL

BPBD Kabupaten Sidoarjo menangani masalah banjir di Kecamatan Waru dengan bantuan dari BPBD Provinsi Jatim yang bertanggung jawab penuh atas proses penanggulangan sesuai pembagian wilayah. Proses bantuan dan evakuasi dilakukan melalui kerjasama antara BPBD Provinsi, RT, RW, serta kepala desa setempat. BPBD Provinsi sering terjun langsung ke desa-desa yang terdekat seperti Waru, Bungurasih, dan Pepelegi, sebab BPBD Kabupaten tidak bisa menjangkau seluruh daerah yang berisiko. Bantuan yang diberikan mencakup penyediaan logistik, peralatan tidur, dan layanan kesehatan melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Saluran pengaduan tersedia selama 24 jam melalui nomor 117, personel yang selalu siap siaga, dan grup WhatsApp untuk mempercepat pengiriman laporan dan tindakan yang diperlukan.

BPBD Provinsi Jatim menghadapi berbagai kendala dalam mengatasi banjir di Kecamatan Waru, seperti keterlambatan laporan dari desa atau RT/RW yang sering diterima dua hari pasca kejadian, yang menghambat proses bantuan dan evakuasi. Akses fisik pun terhalang karena jalan yang sempit dan genangan air lebih dari 50 cm, sementara penggunaan perahu karet sering terhalang oleh pagar rumah warga. Masyarakat kerap menganggap BPBD lambat karena laporan yang diterima bersamaan dan jumlah petugas yang terbatas. Ketidakberaturan saat distribusi makanan di dapur umum juga menjadi masalah. Oleh karena itu, BPBD memperkenalkan regulasi baru: bantuan makanan diambil oleh kepala desa dengan surat resmi dan data penerima yang terverifikasi.

“selain itu, membahas mengenai prioritas, ada 2 hal yang menjadi indikator BPBD Provinsi memprioritaskan suatu wilayah yaitu, cakap penanganan dan koordinasi dengan BPBD Provinsi, ada tidaknya bencana kedua indikator tersebut akan menjadi penilaian untuk BPBD Provinsi, semakin rajin dan disiplin suatu wilayah dalam penanganan dan koordinasi, maka wilayah tersebut akan menjadi wilayah prioritas BPBD Provinsi Jatim. Maka saat terjadi bencana, wilayah tersebut yang akan pertama mendapat bantuan dari BPBD Provinsi Jatim. Mengapa demikian, karena BPBD Provinsi akan menanggapi jika suatu wilayah tidak melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi maka mereka dianggap mampu dalam mengatasi bencana di daerah tersebut.” (wawancara dengan bapak Suprpto selaku ketua tim di bidang kedaruratan dan logistik Kabupaten Sidoarjo)

Dalam hal cakupan atau jangkauan yang ditangani, BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan fungsinya dengan baik dan telah menjangkau sebagian besar lokasi yang berisiko terhadap banjir. Penilaian ini didapat melalui hasil pertemuan koordinasi tahunan yang dilakukan dengan BPBD Kabupaten Sidoarjo dan lembaga terkait lainnya. Dan melihat bagaimana bantuan tersalurkan dengan efektif. BPBD Provinsi juga melakukan analisis area prioritas dengan mempertimbangkan dua faktor penting, yakni tingkat disiplin area dalam berkoordinasi dan kapasitas teknis dalam penanganan. Daerah yang aktif dalam berkoordinasi dan cepat dalam menyampaikan laporan akan menjadi prioritas utama untuk menerima bantuan dari BPBD Provinsi. Di sisi lain, daerah yang jarang berkoordinasi dinilai cukup mampu untuk menangani bencana secara mandiri.



Secara umum, BPBD Provinsi Jawa Timur memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan BPBD Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan dukungan dalam hal koordinasi, bantuan material, penilaian tahunan, dan cara komunikasi yang efisien. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan teknis dan administratif, kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo bisa dikatakan memuaskan dalam menjamin bahwa masyarakat Sidoarjo, khususnya yang berada di daerah yang rentan terhadap banjir, mendapatkan bantuan dan layanan secara adil, merata, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jikalau ada kelompok masyarakat yang merasa belum meratanya pembagian bantuan logistik, yang perlu memberi penjelasan dan keterangan adalah pihak kelurahan. Karena dari pihak BPBD Kabupaten Sidoarjo, mereka menyalurkan bantuan sesuai dengan data dari setiap kelurahan yang mereka terima.

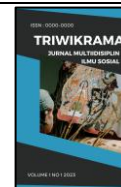
Ketika banjir melanda, langkah awal yang diambil oleh kecamatan adalah berkoordinasi dengan perangkat desa agar semua warga dapat mengakses bantuan dan layanan yang diperlukan. Pihak kecamatan berusaha memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilakukan secara cepat dan tepat melalui kerjasama antar instansi, yang mencakup BPBD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial, serta Babinsa yang berada di area tersebut.

“menurut kami, yang menjadi kendala mereka tidak bisa memberi pelayanan khususnya dalam penangan banjir adalah terjadinya bencana alam khususnya banjir, tidak bisa diprediksi, kondisi yang dimaksud misalkan banjir terjadi di tengah malam. Perangkat kecamatan tidak bisa langsung hari pada saat itu. Kemudian kendala kedua adalah kurangnya koordinasi dari perangkat daerah khususnya kepala desa, contohnya pada saat terjadi bencana kepala desa tidak segera tanggap menghubungi tim kecamatan.” (wawancara dengan ibu Yatik, selaku salah satu penanggungjawab di bagian tanggap darurat Kecamatan Waru)

Namun, dalam praktiknya, pihak kecamatan mengakui adanya sejumlah masalah di lapangan. Salah satu masalah utama adalah sifat bencana banjir yang sulit diprediksi, contohnya ketika banjir terjadi di malam hari atau tengah malam, sehingga petugas perwakilan dari kecamatan tidak dapat segera turun ke lokasi. Selain itu, masalah lain yang sering terjadi adalah kurangnya kerjasama dari perangkat daerah, khususnya kepala desa, yang kadang-kadang tidak langsung melaporkan insiden bencana kepada pihak kecamatan. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan serta dalam proses evakuasi warga yang terdampak.

Menurut penjelasan Lurah Waru, kedalaman air yang menggenangi rumah-rumah warga berbeda-beda, tergantung pada keadaan topografi dan lokasi tempat tinggal mereka. Namun, semua warga yang rumahnya terkena genangan air tetap dianggap sebagai golongan yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah melalui kelurahan dan BPBD dibedakan sesuai dengan tingkat ketinggian air genangan. Untuk warga yang terkena dampak banjir dengan ketinggian antara 10 hingga 20 cm, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan yang disiapkan melalui dapur umum. Di sisi lain, bagi warga dengan ketinggian genangan air lebih dari 20 cm hingga maksimum 50 cm, bantuan yang diberikan meliputi logistik tambahan seperti perlengkapan tidur dan kebutuhan pokok lainnya. Jika ketinggian air sudah melebihi 50 cm, warga yang terdampak akan di evakuasi dan dipindahkan ke tempat pengungsian yang telah disiapkan oleh kelurahan.

Selain itu, pada tahun yang sama, Kelurahan Waru memperoleh dua bantuan besar dari BPBD Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 7 Februari 2024 dan 30 Desember 2024. Bantuan tersebut disalurkan saat banjir mencapai tinggi setara paha orang dewasa, yang mengakibatkan beberapa jalan tertutup dan mengganggu aktivitas warga selama beberapa hari. Sesuai dengan penjelasan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, dalam menangani bencana ini, mereka juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kerjasama ini dilakukan melalui pengiriman tenaga medis dari Puskesmas setempat untuk memberikan layanan kesehatan dan perawatan intensif kepada masyarakat yang sakit atau yang sangat terpengaruh oleh banjir.



“kelurahan sudah melakukan upaya untuk pembersihan sungai sungai dan aliran air disekitaran Kecamatan Waru dibantu dengan BPBD Provinsi karena lokasinya mereka yang berdekatan. Harapannya adalah air akan segera surut karena aliran air nya tidak tersumbat, selain itu supaya saat hujan datang kembali airnya tidak tergenang lebih parah hingga melumpuhkan akses jalan masyarakat.” (wawancara dengan wakil lurah desa Waru)

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya banjir, pihak Kelurahan Waru telah melaksanakan sejumlah tindakan pencegahan, termasuk membersihkan saluran air dan sungai yang terdapat di area Kecamatan Waru. Aktivitas ini dilakukan dengan bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, mengingat adanya hubungan yang dekat antara dua lembaga tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan aliran air akan menjadi lebih lancar sehingga genangan dapat cepat surut dan tidak mengganggu aktivitas warga saat hujan deras terjadi di masa mendatang.

PEMBAHASAN

Indikator Akses

Indikator akses menurut teori (Purwanto & Sulistyastuti, 2012), mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya.

BPBD Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa bantuan, evakuasi, dan informasi bencana telah diberikan secara merata melalui koordinasi BPBD Provinsi bersama RT, RW, dan kepala desa. Penanganan dilakukan berdasarkan laporan desa, didukung posko 24 jam nomor 117, grup WhatsApp, serta tenaga medis puskesmas. Namun, masih ada kendala seperti keterlambatan laporan hingga dua hari dan hambatan akses fisik. Pihak Kecamatan Waru menilai akses layanan cukup baik melalui posko dan tempat pengungsian, meski sering terlambat saat banjir malam hari. Kelurahan Waru memastikan semua warga berhak menerima bantuan. Warga terdampak masih mengalami kesulitan karena kurangnya informasi dan penyuluhan.

Indikator Cakupan

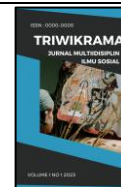
Indikator cakupan menurut teori (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh kebijakan yang diimplementasikan.

BPBD Kabupaten Sidoarjo telah mencakup sebagian besar wilayah rawan banjir berdasarkan koordinasi tahunan dan pemetaan BPBD Provinsi yang mempertimbangkan tingkat disiplin daerah serta frekuensi bencana. Daerah dengan koordinasi baik menjadi prioritas bantuan. Kecamatan Waru menyebut penanganan telah mencakup 80% wilayah melalui pusat bantuan, logistik, dan pemantauan. Kelurahan Waru menyatakan seluruh 10 RW dan 24 RT terdampak mendapat bantuan berupa pangan, logistik, dan pengungsian meski waktu surut tiap wilayah berbeda. Warga merasa bantuan cukup adil, meski ragu seluruh area mendapat perhatian sama. Pemerintah juga menyediakan tenda darurat dan dapur umum.

Indikator Frekuensi

Indikator frekuensi menurut teori (Purwanto & Sulistyastuti, 2012), merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program.

BPBD Kabupaten Sidoarjo mengadakan koordinasi minimal sekali setahun, namun saat banjir koordinasi meningkat menjadi sebulan sekali dengan Dinsos, Dinkes, dan perangkat kelurahan, ditambah komunikasi informal dan online. Di Kecamatan Waru, penanganan banjir rutin dilakukan setiap kejadian dengan melibatkan BPBD, Dinsos, TNI, Polri, dan desa, serta rapat koordinasi berkala. Kelurahan Waru menerima dua bantuan besar pada 2024 dan bantuan kecil rutin saat



banjir musiman, meski pencegahan masih kurang. Bantuan pemerintah tidak selalu diberikan pada banjir kecil, tetapi hanya saat banjir cukup parah dan mengganggu kehidupan warga.

Indikator Bias

Indikator bias menurut teori (Purwanto & Sulistyastuti, 2012), merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer mengalami penyimpangan.

BPBD Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara proporsional tanpa diskriminasi, namun kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga sakit menjadi prioritas evakuasi. Untuk memperkuat inklusivitas, BPBD membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sejak 2023 yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penanganan bencana. Kecamatan Waru menyatakan distribusi bantuan mengikuti data kepala desa dan tidak menunjukkan ketidakadilan; penyimpangan ditangani dengan peringatan. Kelurahan Waru juga memastikan seluruh warga terdampak berhak menerima bantuan dengan prioritas bagi kelompok rentan. Warga menyatakan bantuan diberikan setara tanpa perlakuan berbeda.

Indikator Ketepatan Pelayanan

Indikator ketepatan pelayanan (service delivery) menurut teori (Purwanto & Sulistyastuti, 2012), digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

BPBD Kabupaten Sidoarjo membagi wilayah tugas secara jelas: area sekitar kantor kabupaten ditangani BPBD Kabupaten, sementara wilayah selatan seperti Waru, Bungurasih, dan Sedati ditangani BPBD Provinsi. Setiap bantuan dan logistik wajib disertai data penerima dan laporan pertanggungjawaban yang diaudit Inspektorat. Kecamatan menilai layanan umumnya tepat waktu, meski keterlambatan dapat terjadi jika laporan desa lambat. BPBD dan Kelurahan Waru membagi bantuan berdasarkan tinggi genangan: 10-20 cm bantuan pangan, 20-50 cm logistik tambahan, dan di atas 50 cm evakuasi. Masyarakat menilai bantuan sesuai kebutuhan, namun sering datang terlambat saat banjir terjadi.

Indikator Akuntabilitas

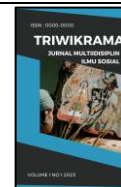
Indikator akuntabilitas menurut teori (Purwanto & Sulistyastuti, 2012), digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan output kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

BPBD Kabupaten Sidoarjo menghadapi masalah teknis seperti ketidakteraturan warga saat pengambilan makanan di dapur umum, namun telah memperbaikinya dengan mewajibkan surat resmi dari desa dan daftar penerima, serta membagi makanan dua kali sehari agar lebih tepat waktu dan merata. Kecamatan Waru meningkatkan efisiensi melalui koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan informasi lapangan, dan evaluasi rutin. Kolaborasi BPBD dengan Dinas Kesehatan, puskesmas, serta partisipasi warga dalam pembersihan saluran air menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif. Menurut masyarakat, akuntabilitas terlihat dari distribusi bantuan melalui ketua RT dan dukungan dapur umum yang sangat membantu.

Indikator Kesesuaian Program Dengan Kebutuhan

Indikator kesesuaian program dengan kebutuhan menurut teori (Purwanto & Sulistyastuti, 2012), digunakan untuk mengukur apakah berbagai output kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

BPBD Sidoarjo dan BPBD Provinsi Jatim dinilai responsif dengan menyiagakan personel 24 jam, menyediakan posko, serta memanfaatkan komunikasi cepat melalui grup koordinasi dan nomor darurat. Kecamatan Waru juga menunjukkan responsivitas yang baik melalui pemantauan langsung, koordinasi dengan desa, serta penyaluran aspirasi warga melalui RT/RW untuk dibahas



dalam rapat perbaikan program. Kelurahan Waru menyampaikan bahwa masukan masyarakat, terutama kelompok rentan, segera diteruskan ke BPBD Provinsi. Masyarakat merasa bantuan sesuai kebutuhan dan terbantu melalui koordinasi RT/RW, meski respons awal banjir masih perlu ditingkatkan melalui sistem pelaporan digital.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penanganan banjir dilakukan melalui koordinasi BPBD Kabupaten Sidoarjo dengan BPBD Provinsi, kecamatan, kelurahan, RT/RW, dan layanan darurat. Bantuan logistik, evakuasi, dan kesehatan disalurkan berdasarkan laporan desa, namun sering terkendala keterlambatan laporan, akses sulit, dan anggapan respons lambat. Kecamatan Waru menjadi penghubung koordinasi dengan perangkat daerah dan memastikan bantuan adil, meski tantangan prediksi banjir dan koordinasi masih ada. Kelurahan Waru menerima bantuan provinsi dan bekerja sama melalui mekanisme RT/RW. Warga menilai bantuan cukup adil dan membantu, meski akses informasi masih kurang. Secara umum, kinerja BPBD cukup baik namun masih perlu perbaikan teknis.

Saran

1. Perbaikan sistem pelaporan berbasis digital, seperti membuat aplikasi atau situs laporan cepat untuk desa dan masyarakat supaya informasi tentang banjir bisa langsung diterima dan tidak tergantung pada laporan manual.
2. Peningkatan kapasitas personel dan relawan dengan menambah jumlah petugas yang bekerja di lapangan, mendidik relawan lokal, dan meningkatkan kerja sama dengan Unit Layanan Disabilitas agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
3. Penguatan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat dengan sering mengadakan pelatihan rutin tentang cara menghadapi keadaan darurat, jalur evakuasi, dan cara melapor agar warga lebih siap saat menghadapi banjir.
4. Optimalisasi sarana dan prasarana penanggulangan banjir, menambah jumlah perahu karet, pompa air, dan alat-alat lainnya, terutama di daerah yang rawan banjir dengan akses yang sulit atau sering tergenang air tinggi.
5. Meningkatkan transparansi dan mitigasi pra-bencana dengan membuat peta yang menunjukkan daerah-daerah yang rentan terhadap banjir, meningkatkan aktivitas sebelum bencana seperti membersihkan saluran air, dan memberikan informasi tentang risiko banjir secara terbuka kepada masyarakat.
6. Memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengajak akademisi, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat lainnya untuk membantu dalam penelitian, pencegahan, pendidikan, dan pemberdayaan warga.

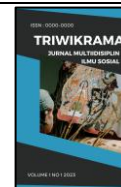
5. DAFTAR PUSTAKA

Adolph, R. (2016a). <https://Bpbd.Bogorkab.Go.Id/>, 1–23.

Adolph, R. (2016b). <https://Bpbd.Bogorkab.Go.Id/>. 1–23.

BPBD JATIM. (2023). Banjir: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya. <https://Web.Bpbd.Jatimprov.Go.Id/>, Cahyaka, H. W., Wibowo, A., Handayani, K. D., Wiyono, A., & Santoso, E. H. (2018). Analisa Penanggulangan Banjir Pada Sistem Drainase Das Sidokare Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Hec-Ras. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil*, 1(1), 186–194.

DINAS PUPR. (2020). Drainase – Permasalahan Dan Solusinya. <https://Dinaspupr.Bandaacehkota.Go.Id/>, 1.



- EKA WIJAYA, D. W., & Fauji, D. A. S. (2021). Determinan Kinerja Karyawan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 1(2), 84–94. <https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.103>
- Infaindan, H., Amiruddin, A., & Utami, A. K. (2024). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 19(1), 101–114. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.379>
- Kidung Tanggulangin. (n.d.). Sejarah Banjir di Sidoarjo dan Pelajaran yang dapat diambil. <https://Kidungtanggulangin.Com/>, 1.
- Mangkunegara. (2016). Telaah Pustaka. *Kinerja*, July, 1.
- Manurung, H., Nurcahyanto, H., & Hariani, D. (2013). *Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang Universitas Diponegoro*. 20–31.
- N, F. S. (2024). BPBD Sidoarjo Sebut Banjir Terjadi di Wilayah Jarang Tergenang. <https://www.rri.co.id/>, Purnawali, H. S. (2018). *Flood vulnerability analysis at sidoarjo regency using geographic information system and remote sensing*. 158.
- pusdalops. (2024). Banjir Melanda Wilayah Utara Kabupaten Sidoarjo. <https://web.bpbid.jatimprov.go.id/>,
- Rahmawati, F., & Choiriyah, I. U. (2024). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and ...*, 51–62. <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1028>
- Rahmawati, E., & Aritonang, N. (2016). Analisa Kapasitas Tampung Pada Sungai Pucang Kabupaten Sidoarjo Dalam Menampung Debit Banjir. *Jurnal Rekayasa Teknik Sipil*, 02(02), 84–92.
- Reni Insyiroh, Sri Indarti, & Darmi, T. (2023). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(2), 223–238. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i2.5202>
- Rina Amelia, Slamet Triyadi, U. M. (2023). 3 1,2,3. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 656–664.
- Setiawan, B., Hasyim, A. W., & Sasongko, W. (2021). Skenario Penanggulangan Banjir Di Kabupaten Sidoarjo. *Planning for Urban ...*, 10(April), 149–158.
- Suparyanto dan Rosad. (2015). Kajian Teoritis. *Suparyanto Dan Rosad*, 5(3), 248–253.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). Teori-Teori Pengukuran Kinerja. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Wang, Y. C., Chen, W. C., Lin, K. P., & Tseng, W. C. (2025). Utilizing an adenosine triphosphate bioluminescence assay as an indicator of instrument and environmental cleanliness in the radiology department: a pilot study. *Infection Prevention in Practice*, 7(2), 100449. <https://doi.org/10.1016/j.infpip.2025.100449>
- youssef, A., Halkhams, I., El Alami, R., Ouazzani Jamil, M., & Qjidaa, H. (2024). A new approach to designing a multiband antenna using photonic crystals and load graphene for terahertz application. *Results in Engineering*, 22(March), 102327. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102327>